



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

TUGAS

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan:

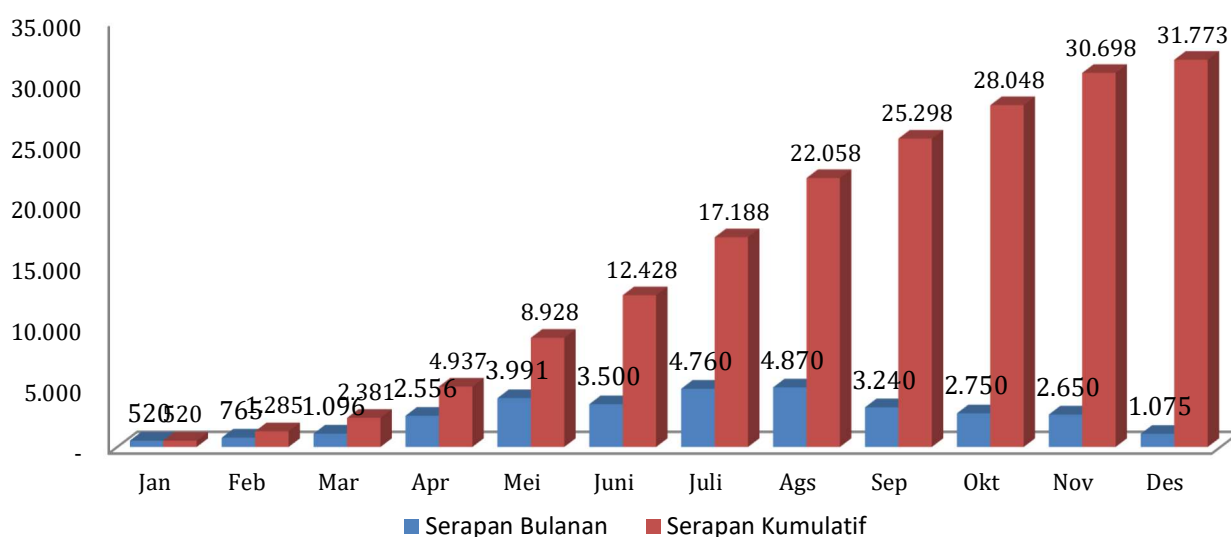
1. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Menelaah dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Menelaah kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mengkaji, dan mengembangkan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Melaksanakan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Mengkaji, membina, dan mengembangkan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Mengkaji, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Melaksanakan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
9. Memberikan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan bantuan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan di daerah; dan
10. Melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

TARGET CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2017	
			KINERJA	ANGGARAN
Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian	1.	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	190 Naskah	4.380.118.000
	2.	Jumlah masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan	70 Masalah Hukum	4.248.870.000
	3.	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	144 Unit Kerja	4.479.945.000
	4.	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	144 Unit Kerja	2.187.309.000
	5.	Jumlah jabatan di lingkungan Kemdikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya	425 Jabatan	2.995.440.000

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi tahun 2017 Rp31.773.000.000,00 yang terdiri atas anggaran untuk kegiatan substantif sebesar Rp18.291.682.000,00 dan untuk kegiatan yang bersifat pendukung sebesar Rp13.481.318.000,00

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2017 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL



	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Serapan Bulanan	520	765	1.096	2.556	3.991	3.500	4.760	4.870	3.240	2.750	2.650	1.075
2	Serapan Kumulatif	520	1.285	2.381	4.937	8.928	12.428	17.188	22.058	25.058	28.048	30.698	31.773
3	Prosentase Penyerapan	1,64	4,04	7,49	15,54	28,10	39,11	54,10	69,42	79,62	88,28	96,62	100

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal,

TTD.

Didik Suhardi
NIP. 196312031983031004

Jakarta, 1 Januari 2017
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001